

## RINGKASAN

**Andrian Putra Ade Pratama. Prosedur Pengelolaan Barang Milik Negara Dari Barang Rampasan Negara Laporan. Dosen Pembimbing: Endro Sugiartono, S.E., M.M.**

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara merupakan unit eselon II dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang bertugas mengelola Barang Milik Negara (BMN). Kegiatan magang ini merangkum hasil praktik kerja lapangan di Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara (Dit. PKN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yang dilaksanakan pada 1 September hingga 31 Desember 2025. Fokus utama laporan ini adalah menganalisis prosedur pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Barang Rampasan Negara pada Subdirektorat PKN III. Selama masa magang, penulis terlibat langsung dalam proses administrasi dan verifikasi dokumen permohonan aset yang diajukan oleh kementerian atau lembaga negara.

Prosedur pengelolaan Barang Rampasan Negara dilakukan berdasarkan PMK Nomor 145/PMK.06/2021 terhadap aset yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Secara ringkas, proses dimulai dari usulan kementerian/lembaga pemohon kepada DJKN, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap verifikasi kelengkapan berkas dan kesesuaian fisik. Hasil dari prosedur ini adalah terbitnya surat persetujuan dari Menteri Keuangan dalam bentuk Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah, pemanfaatan, pemusnahan, atau penghapusan barang, tergantung pada nilai dan potensi kegunaan aset tersebut bagi negara.

Dalam pelaksanaannya, laporan ini mengidentifikasi beberapa tantangan administratif melalui analisis Diagram Ishikawa, seperti beban kerja yang tinggi dan ketergantungan pada dokumen fisik yang memperlambat proses pengambilan keputusan. Kondisi ini berisiko menyebabkan aset negara menganggur (*idle*) dan meningkatkan biaya pemeliharaan. Oleh karena itu, penulis menyarankan adanya penyusunan panduan teknis yang lebih praktis serta peningkatan koordinasi

komunikasi antar instansi guna meminimalisir kesalahan dokumen di masa mendatang.

Manfaat atau *outcome* yang diperoleh penulis melalui kegiatan magang ini adalah peningkatan keterampilan teknis dalam manajemen aset sektor publik dan pemahaman mendalam mengenai birokrasi kementerian. Pengalaman ini memberikan gambaran nyata mengenai penerapan regulasi keuangan negara yang sebelumnya hanya dipelajari secara teori. Melalui keterlibatan dalam tugas-tugas di DJKN, penulis memiliki kesiapan profesional yang lebih baik untuk berkontribusi dalam bidang Akuntansi Sektor Publik, khususnya dalam upaya optimalisasi kekayaan negara